

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2017 meliputi Kantor Satpol PP, Kantor Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Humas dan Umum, Kelurahan Mlipak, Kelurahan Pagerkukuh, Kelurahan Bumireso, Kecamatan Kertek, Kelurahan Wringinanom, Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumang, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Garung, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Kepil, dan Kecamatan Wadaslintang.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasi dana sebesar **Rp 16.846.252.557,-** atau **0,84%** dari total alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah **Rp 2.000.613.704.761,-**. Alokasi untuk Trantibum Linmas ini dapat terealisasi sebesar **Rp 15.637.712.459,-** atau **92,83%**. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Trantibum Linmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.5.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Trantibum dan Linmas
Tahun 2017

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	7.872.118.950	7.564.045.847
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.579.950	1.055.949.852
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	553.382.000	501.849.866
3	Program peningkatan disiplin aparatur	99.500.000	98.546.000
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.753.074.000	2.693.188.206
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.147.283.000	2.096.519.400
6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	182.800.000	159.522.400
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	559.500.000	495.105.523
8	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	233.000.000	216.784.600
9	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	150.000.000	146.790.000
10	Program pendidikan politik masyarakat	100.000.000	99.790.000
B	Belanja Tidak Langsung	8.974.133.607	8.073.666.612
	Belanja Pegawai	8.974.133.607	8.073.666.612

III.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah Total		16.846.252.557	15.637.712.459

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kantor Satpol PP, Kesbangpol, dan BPBD melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan; Penyelesaian Pekerjaan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini untuk meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan trantibum dan linmas melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor; serta Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3) Program peningkatan disiplin aparatur

Dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional maka dilaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi anggota Satpol PP dan pakaian kerja lapangan bagi BPBD. Pengadaan pakaian untuk kerja lapangan bagi BPBD berupa 17 buah pakaian kerja lapangan tim BPBD dan 18 buah untuk tenaga pemadam kebakaran.

4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dalam rangka mengurangi gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya melakukan pemantapan sistem keamanan lingkungan dengan mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi serta kemitraan Satlinmas, tokoh masyarakat/agama/ormas dan organisasi politik.

Untuk memantapkan perilaku masyarakat dalam menciptakan kondisi aman, sehat rapi dan indah maka telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain : Penegakan peraturan daerah terpadu (pajak rokok), Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah. Program ini juga ditujukan untuk merespon adanya keluhan dari beberapa pihak tentang buruknya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu wujud dari kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Terpadu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembinaan dan operasi yustisi dan non yustisi yang dilaksanakan pada mulai bulan Januari-Desember 2017, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran perda, penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran perda /peraturan lain yang dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga, sosialisasi peraturan perda dan perundang undangan lainnya, peningkatan kualitas dan kuantitas PPNS Satpol PP, membangun pola kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam penegakan perda, pembinaan dan penertiban PKL, operasional penertiban spanduk/ *banner* yang melanggar ketentuan dan pengamanan pejabat, unjuk rasa, aset, serta pengamanan kegiatan lainnya.

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Kantor Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang berpotensi terjadinya konflik sosial di masyarakat serta untuk pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan konflik sehingga terwujudnya kondisi masyarakat aman, tentram, tertib dan teratur.

5) Program pengembangan wawasan kebangsaan

Pembangunan wawasan kebangsaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu :

- Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bela Negara, meningkatkan rasa patriotisme, rasa cinta tanah air dan bangsa dalam kebhinekaan dan persatuan sehingga dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ceramah dan FGD wawasan kebangsaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, demokrasi, rasa persatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan demi tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ceramah wawasan kebangsaan diikuti oleh elemen dari PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama dari Desa Plobangan, Kelurahan Garung, wali murid SD, siswa SMP dan SMA. Sedangkan FGD wawasan kebangsaan ini diikuti oleh PMII/ HMI, siswa SLB

Karya Bhakti Don Bosco, Pramuka, Generasi Muda, PKK , ormas, dan kelompok seni Bengilon Desa Sariyoso.

- Pendidikan Kader Bela Negara (PKBN) yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran bela negara di kalangan pelajar SLTA sehingga tumbuh rasa patriotisme, rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa persatuan dan kesatuan, terbentuknya karakter bangsa dalam jiwa generasi muda yang unggul yang siap menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Ziarah Kebangsaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemahaman akan arti perjuangan para tokoh tokoh pendiri kabupaten wonosobo sehingga generasi muda dapat meneladani dan mewarisi sifat-sifat serta nilai-nilai perjuangan para pendiri Wonosobo serta dapat melanjutkan perjuangan mereka dalam mengisi dan memajukan Wonosobo khususnya dan bangsa Indonesia.
- Kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya pada hakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Wonosobo sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki wawasan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia yang mampu berperan aktif dan mandiri dalam pembangunan guna memelihara integritas bangsa maupun daerah. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT Kemerdekaan RI.

6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Tanggung jawab masalah keamanan ini tidak hanya terletak pada pemerintah namun juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kriminalitas menumbuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan antara lain : Silaturahmi Tomas, Toga dengan MUSPIDA, Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan, Pelatihan Linmas Siaga Bencana. Penyelenggaraan Silaturahmi Tomas, Toga dengan MUSPIDA ini bertujuan untuk membuat situasi Wonosobo yang kondusif baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan bermasyarakat dan beragama yaitu dengan mengumpulkan para tokoh agar bisa mengajak para anggota / jamaahnya untuk bersama sama bisa menjaga situasi.

7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program ini bertujuan untuk meminimalisir korban dan dampak negatif akibat terjadinya bencana dari sekian banyak bencana alam terutama bencana tanah longsor yang terjadi mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan

demografis Kabupaten Wonosobo yang potensial terjadi bencana. Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dini, penanggulangan dan penanganan bencana di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam, Penyusunan RISP (rencana induk sistem proteksi kebakaran), Fasilitasi Pembinaan Relawan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Internalisasi Desa Siaga bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor, Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana, Pelatihan Penanggulangan Kebencanaan Linmas/Hansip, Optimalisasi Penanggulangan Bencana, Pelatihan Jitu Pasma (pengkajian kebutuhan pasca bencana).

8) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan yang dilakukan antara lain : Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Validasi data Ormas dan LSM, Operasi PEKAT dan PEJAR, Optimalisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM.

Operasi penanggulangan kenakalan remaja/ pelajar bertujuan untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja dan pelajar di Wonosobo sehingga tercipta situasi aman kondusif di wilayah Wonosobo. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret-Desember 2017 dengan melibatkan unsur daerah dan vertikal terkait dengan sasaran pada tempat-tempat seperti : taman, warnet, playstation, hotel, losmen, tempat karaoke, villa, tempat kost pada jam-jam sekolah atau di waktu malam hari.

9) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Dalam rangka mencegah ataupun memberantas tindakan/perbuatan yang muncul dan dapat meresahkan anggota masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang aman, kondusif dan terkendali di wilayah Kabupaten Wonosobo maka dilakukan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang terinci dalam beberapa kegiatan yaitu Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (DBHCHT), Penanggulangan kenakalan anak remaja/ pelajar (Pajak Rokok), Pelatihan Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (Pajak Rokok).

Fasilitasi Pencegahan Narkoba dilakukan melalui penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba dan Pelatihan Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkoba (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba (KAPA) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman/pengetahuan tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba demi terciptanya generasi muda yang terbebas dari pengaruh narkoba.

10) Program pendidikan politik masyarakat

Dalam rangka meningkatkan persentase pemilih maka diselenggarakan kegiatan Pembinaan politik bagi Pemuda serta Bintek Keuangan Parpol. Pembinaan politik bagi pemuda dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik bagi pemuda khususnya bagi pemilih pemula, seperti dari kalangan siswa SMA/ SMK. Sedangkan Bintek Keuangan Parpol dilaksanakan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi Pengurus dan Anggota Parpol yang menerima bantuan keuangan.

c. Capaian Kinerja Urusan Trantibum Dan Linmas

Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo dilihat dari IKK dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel III.B.5.2
Capaian Kinerja Urusan Trantibum dan Linmas berdasarkan Indikator EKPPD

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Capaian Kinerja		
			2015	2016	2017
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	63	3	2
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	4	2
3	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2017 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	0,51 %	0,64 %	0,53%
4	Keberadaan Perda tentang PSK dan PKL	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	ada	Ada	ada

Sumber : Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Kab. Wonosobo, 2018

Frekuensi kegiatan Pembinaan politik daerah pada tahun 2017 mengalami penurunan dari 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan di tahun 2017. Penurunan jumlah jumlah kegiatan pembinaan politik pada tahun 2017 disebabkan pada tahun 2017 tidak ada pesta demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Demikian juga dengan kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP juga mengalami penurunan jumlah pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah LSM, ormas dan OKP sedangkan jumlah anggaran mengalami stagnasi.

III.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 0,53%. Turunnya rasio satpol PP terhadap jumlah penduduk disebabkan oleh adanya mutasi pegawai Satpol PP ke perangkat daerah lainnya dan memasuki masa pensiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka jumlah minimal pegawai Satpol PP dari kabupaten/kota minimal pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai.

Tabel III.B.5.3
Capaian Kinerja Urusan Urusan Trantibum dan Linmas
berdasarkan Indikator RKPD tahun 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
1	Tingkat partisipasi pemilih	72,92%	73,60%	72,92%	99,08	→
2	Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya	1	100%	5,00%	5,00	↓
3	Persentase siskamling aktif	55%	55%	50,00%	90,91	→
4	Prosentase FKDM yang aktif	65%	70%	60,00%	85,71	↓
5	Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah	70%	70%	50,00%	71,43	↓
6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000	4,42	4,42	4,42	100,00	○
7	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	75%	90%	67,00%	74,44	↓
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	85%	90%	100,00%	111,11	○
9	Angka kriminalitas yang tertangani	70%	85%	75,00%	88,24	↓
10	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk	0,025	0,005	0,025	500,00	○
11	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan	0,25	0,29	7,460	2572,41	○

III.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN 2016	TARGET TAHUN 2017	REALISASI CAPAIAN 2017	% REALISASI CAPAIAN 2017	STATUS CAPAIAN
	ketentraman masyarakat					
12	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1,23	1,3	4,4	338,46	○
13	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,64	0,64	0,53	82,81	↓
14	Persentase LINMAS terlatih	9%	15%	8,00%	53,33	↓
15	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,05	4,80	39,06%	8,14	↓
16	Persentase desa siaga bencana	25%	30%	25,00%	83,33	↓
17	persentase sekolah tanggap bencana		80%	0,00%	0,00	↓
18	capaian pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran		0	0,00%	0,00	↓
19	cakupan pelayanan bencana kebakaran	92%	93%	95,00%	102,15	○
20	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	35%	40%	35,00%	87,50	↓

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD Kab. Wonosobo, 2018

Keterangan Status Capaian

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 99%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.B.5.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Kantor Kesbangpol

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	2
	b. S-1	3
	c. DI-DIV	-
	d. SMA	9
	e. SMP	-
	f. SD	-
	Jumlah	14
2	Golongan	
	a. Golongan IV	1
	b. Golongan III	7
	c. Golongan II	6
	d. Golongan I	-
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	14
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	1
	Staf/Fungsional Umum	12
	Jumlah	14

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo, 2017

Tabel III.B.5.5
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-3	1
	b. S-2	2
	c. S-1	3
	d. DI-DIV	1
	e. SMA	13
	f. SMP	5
	g. SD	3
	Jumlah	28

III.B.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3	Golongan	
	a. Golongan IV	2
	b. Golongan III	8
	c. Golongan II	15
	d. Golongan I	3
	e. Tenaga Kontrak	
	f. THL/GTT/PTT	
	Jumlah	28
4	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	
	b. Esselon III	1
	c. Esselon IV	4
	Staf/Fungsional Umum	23
	Jumlah	28

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo, 2017

Tabel III.B.5.6
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Kantor Satpol PP dan Linmas

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	5
	b. S-1	10
	c. DI-DIV	0
	d. SMA	30
	e. SMP	6
	f. SD	3
	Jumlah	54
2	Golongan	
	a. Golongan IV	5
	b. Golongan III	20
	c. Golongan II	26
	d. Golongan I	3
	e. Tenaga Kontrak	
	f. THL/GTT/PTT	
	Jumlah	54
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	1
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	2
	Staf/Fungsional Umum	49
	Jumlah	54

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo, 2017

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.B.5.7
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kantor Kesbangpol

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp)
	ASET TETAP	1.015.133.400,00
01	Tanah	75.000.000,00
02	Peralatan dan Mesin	670.161.400,00
	Alat-alat Besar	0,00
	Alat-alat Angkutan	511.113.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	133.968.000,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	25.080.400,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	0,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	269.972.000,00
	Bangunan Gedung	269.972.000,00
	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017

Tabel III.B.5.8
Kondisi Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
A	ASET TETAP	6.238.316.192,00
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	5.601.725.148,00
02	Alat-alat Besar	13.915.000,00
03	Alat-alat Angkutan	5.017.165.020,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	49.170.000,00
05	Alat Pertanian	0,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	452.141.028,00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	29.898.000,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	0,00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	39.436.100,00
3	Gedung dan Bangunan	636.591.044,00
11	Bangunan Gedung	636.591.044,00
12	Monumen	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
15	Instalasi	0,00
16	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	0,00
7	Aset Lainnya	0,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017

f. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.B.5.9
Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi/Upaya yang perlu dilakukan
1.	Masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami perlunya kecintaan terhadap tanah air, pentingnya rasa persatuan, dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi Negara	Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
2.	Kelompok-kelompok radikal selalu memanfaatkan situasi dan moment-moment tertentu untuk kepentingannya sendiri/ kelompoknya sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial	Penguatan kewaspadaan wilayah terhadap ancaman, hambatan, dan gangguan.
3.	Belum terpadunya pemahaman terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintahan	Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang melibatkan stakeolder terkait.
4.	Adanya keterbatasan letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam menghambat kecepatan penyebaran arus data dan penanganan bencana	Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan dibidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana melalui pembentukan komunitas tanggap bencana